

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tepat usai fenomena Perang Dingin di antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, perkembangan isu mengenai politik keamanan tidak lagi menjadi urgensi pada setiap relasi di antara negara-negara dunia. Kebanyakan negara yang mengalami berbagai kerugian akibat perang perlahan mengubah haluan hubungan antar negara dari sekutu perang menjadi hubungan yang penuh dengan kedamaian. Aspek lain yang mempengaruhi perubahan haluan hubungan antar negara adalah kesadaran atas ketergantungan ekonomi. Perkembangan atas kebutuhan konsumsi masyarakat dunia menjadikan kegiatan perekonomian serta dagang sebagai sektor utama bagi negara-negara di dunia. Tidak ada negara yang dapat memenuhi keperluan masyarakatnya tanpa bantuan negara lain.

Perubahan haluan hubungan antar negara yang lebih memprioritaskan isu ekonomi juga mempengaruhi perkembangan arus globalisasi. Globalisasi mempengaruhi aspek telekomunikasi dan teknologi yang mengedepankan efisiensi. Dengan kata lain, siapa saja dapat berinteraksi secara masif dan efisien tanpa adanya batasan geografis antar negara. Hal ini membuat pergerakan manusia semakin fleksibel. Modal, barang, jasa, pengetahuan, informasi, serta aspek lain semakin efisien. Pendanaan sebuah negara turut selalu bersirkulasi atau

berinteraksi. Globalisasi yang mempermudah banyak bidang ini memunculkan aktor atau pemeran dari negara bersangkutan dalam hubungan internasional.

Kemunculan aktor dari negara-negara seluruh dunia mengubah perkembangan hubungan internasional dan tidak lagi bersifat *State Centric*¹. Dalam hubungan ini aktor-aktor dapat berupa INGO (*International Non-Government Organization*), foundation, perusahaan multinasional, maupun kelompok yang dengan kepentingan pada berbagai dalam birokrasi pemerintahan, misalnya pemerintahan di tingkat daerah. Struktur seperti tersebut seringkali dikenali sebagai hubungan transnasional.²³

Dari hubungan transnasional ini muncul sebuah konsep yang dinamakan kota kembar atau sister city. Gagasan awal dari sister city adalah upaya membangun hubungan solidaritas antara kota-kota di negara yang mengalami peristiwa serupa. Seiring berjalannya waktu konsep sister city menyesuaikan dengan zaman dimana upaya membangun hubungan didasarkan pada faktor-faktor kesamaan seperti kesamaan sejarah, migrasi, dan digunakan untuk membentuk hubungan bisnis yang strategis antar kota.

Terpecahnya Korea Selatan dengan Korea Utara menunjukkan perbedaan sistem perekonomian yang dipakai di kedua negara. Korea Utara menggunakan sistem ekonomi terencana, sedangkan Korea Selatan menggunakan ekonomi pasar

¹ State Sentris merupakan sebuah teori yang menjelaskan sebuah lingkup hubungan/transaksi internasional yang berpusat pada aktor negara, dalam artian negara sebagai subjek atau pemain tunggal.

² Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, (Yogyakarta: Phinisi Press, 2013), hlm. 4.

³ Hubungan Transnasional adalah interaksi yang dilakukan oleh Organisasi non-negara/NGO yang melintasi batas-batas nasional.

atau liberal. Kedua hal tersebut sangat bertolak belakang.⁴⁵ Penerapan sistem ekonomi pasar di Korea Selatan mampu untuk menghasilkan berbagai aktor dalam hubungannya dengan negara lain di awal abad ke 21.

Perbedaan ideologi Indonesia di awal kemerdekaan dengan Korea Selatan menyebabkan hubungan kedua negara sangat lemah. Ini mengakibatkan kedua negara tersebut tidak menjalin hubungan bilateral selama kurang lebih 20 tahun.⁶ Hubungan diplomatik tingkat konsuler pada 1966 merupakan tahapan pertama kala melaksanakan relasi dengan Indonesia melalui kerja sama secara optimal.⁷ Langkah pertama hubungan ini menimbulkan peluang bagi masing-masing negara untuk bekerja sama di beberapa sektor. Hubungan di bidang ekonomi berbanding lurus dengan hubungan di bidang politik.⁸ Kerja sama di bidang perekonomian mampu memberikan manfaat bagi suatu negara untuk saling membantu, mengisi, dan melengkapi. Pada periode yang sama, Pemerintah Korea Selatan meletakkan batu pijakan pertama dalam isu-isu internasional dengan meresmikan undang-undang pro aktif politik luar negeri.⁹

⁴ Kutipan diolah dan diinterpretasi kembali dari sumber yang dilacak melalui internet <https://kemlu.go.id/pyongyang/id/read/Korea-utara/2254/etc-menu>, diakses tanggal 7 Maret 2020 pukul 19:21 WIB.

⁵ Kutipan diolah dan diinterpretasi kembali dari sumber yang dilacak melalui internet https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu, diakses tanggal 7 Maret 2020 pukul 19:29 WIB.

⁶ Kwang-jin Choi, "The Republik of Korea's Public Diplomacy Strategy: History and Current Status" dalam *CPD Perspectives*, edisi Januari 2019, hlm. 8.

⁷ Kutipan diolah dan diinterpretasi kembali dari sumber yang dilacak melalui internet https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu, diakses tanggal 7 Maret 2020 pukul 20:01 WIB.

⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDA KARYA, 2005), hlm. 137.

⁹ Byung-kook Kim dan Ezra F. Vogel, *The Park Chung Hee Era*, (Inggris: Harvard University Press, 2011), hlm. 404.

Indonesia menjelaskan hubungan luar negerinya melalui UU No. 37 Tahun 1999 yang disebutkan melalui Pasal 1, Ayat (1), “Hubungan Luar Negeri merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau Lembaga-lembaganya, Lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.”¹⁰ Melalui UU, dapat dilihat bahwa tidak hanya pemerintahan pusat yang mampu melaksanakan kegiatan luar negeri, pemerintahan daerah juga termasuk aktor sebagai *sub-state*. UU No. 37 Tahun 1999 mengakui dan memberikan kelegalan terhadap kegiatan maupun pelaksanaan relasi dalam skala internasional dari pemerintahan tingkat daerah di Indonesia.

Sister City atau *Twin Towns* atau *Sister Province* merupakan kerja sama dalam meneruskan hibah atau pinjaman, menyertakan modal, hingga tenaga ahli; kerja sama bantuan kemanusiaan; dan kerja sama lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.¹¹ Tidak bisa dipungkiri, beragamnya bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan membuat Sister City lebih menguntungkan apabila dilihat dari dampak berkepanjangan.

Sister City dilaksanakan oleh pemerintahan dalam tingkatan Madya/Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Kota Administratif bersama pemerintahan di luar negeri yang setingkat.¹² Implementasi program Sister City di Indonesia pertama kali dilaksanakan oleh Kota Bandung bersama Kota Braunschweig (Jerman) tanggal 2

¹⁰ Takdir Ali Mukti, *op. cit.*, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹² Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), hlm. 107.

Juni 1960.¹³ Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Sister City mulai dilaksanakan oleh berbagai pemerintahan daerah Indonesia, termasuk Surabaya.

Surabaya cukup aktif memanfaatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalin kerja sama internasional. Keaktifan ini dibuktikan dengan adanya 14 Kota di luar negeri yang menjalin Sister City dengan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain Kota Seattle (Amerika Serikat, 1992), Kota Busan (Korea Selatan, 1994), Kota Izmir (Turki, 1995), Kota Kōchi (Jepang, 1997), Kota Monterrey (Meksiko, 2001), Kota Ghuangzhou (Tiongkok, 2005), Kota Xiamen (Tiongkok, 2006), Kota Marsheille (Perancis, 2007), Kota Shah Alam (Malaysia, 2009), Kota Varna (Bulgaria, 2010), Kota Kitakyūshū (Jepang, 2012), Kota Jiangmen (Tiongkok, 2012), Kota Liverpool (Inggris, 2017), dan Kota Gaziantep (2019).¹⁴

Kota Busan adalah bagian dari Korea Selatan yang diklasifikasikan sebagai kota besar. Kota Busan memiliki kesamaan dengan Kota Surabaya, yakni sebagai kota pelabuhan dan kota terbesar kedua di negaranya. Program antara Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Busan sudah terjalin dari 10 November tahun 1994. Di dekade yang sama, Korea Selatan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Indonesia, mewujudkan arah gerak investasi menuju ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai prioritas investasi.

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴ Kutipan diolah dan diinterpretasi kembali dari sumber yang dilacak melalui internet https://kerja_sama.surabaya.go.id/mitra-luar-negeri/, diakses tanggal 29 September 2020 pukul 22:10 WIB.

Selama 20 tahun, ada beberapa bentuk kerja sama antara Kota Surabaya dengan Kota Busan, antara lain *Asian Youth Education Forum*, *Global Gathering*, Festival Lintas Budaya, *Teacher's Development Capacity Education Program*, *Principalls Development Capacity Education Program*, *The Global Volunteer Corp*, dan pertukaran pelajar.¹⁵ Tercatat juga ada beberapa pihak yang berinisiatif untuk menindaklanjuti kerja sama ini, seperti Memorandum of Understanding (MoU) antara *Busan Fashion Association* dan Surabaya Batik Association, penandatanganan Sister Parliament antara DPRD Kota Surabaya dengan Busan City Council, dan MoU antara KADIN Surabaya dengan KADIN Busan.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada aspek kerja sama transnasional pada masa pemerintahan Tri Rismaharini di Surabaya dan sedikit membahas pada masa H. Sunarto Sumoprawiro dan Bambang Dwi Hartono. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- Apa kepentingan serta bentuk kerja sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan sejak 2007 hingga 2015.
- Dampak dari adanya kerja sama bagi masyarakat Kota Surabaya.

¹⁵ Wawancara dengan Dewi Wahyu Wardani, tanggal 29 April 2021 pukul 15.00-16.00, di Jl. Jimerto No. 25-27 Lt. III, Surabaya.

Dari kerja sama ini, kita bisa melihat bagaimana Surabaya di masa mendatang dapat memanfaatkan dan mengembangkan *e-governance* serta melahirkan SDM yang berkualitas.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yakni mengenai keberlangsungan kerja sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan sejak 2007 hingga 2015. Kesepakatan kerja sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Untuk itu, perlu dijelaskan mengenai dampak kerja sama Sister City ini bagi penduduk Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, karakteristik, dan dampak dari kerja sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan.

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk menambah referensi mengenai sejarah interaksi orang-orang Asia Timur di Indonesia, khususnya antara Kota Busan dan Kota Surabaya. Kemudian, penelitian ini mampu melengkapi sejarah orang Korea yang masih jarang dibahas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat pembaca yang terfokus kepada sejarah hubungan internasional, juga diharapkan bermanfaat bagi sejarawan yang ingin memulai menulis tentang sejarah dan keberadaan orang-orang Korea di daerah lain di Indonesia lebih lanjut. Penelitian ini jika dilihat outcomenya berdampak pada pembangunan kota serta kebijakan publik bagi pemerintah kota Surabaya.

1.4. Batasan dan Ruang Lingkup Bahasan

Penulis memilih Surabaya dan Busan sebagai batasan spasial. Sedikitnya penelitian terkait hubungan antar kota, terutama di kota Surabaya membuat penulis ingin membuka pandangan baru dalam aspek sejarah hubungan internasional antar kedua kota. Penulis juga mengharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan di masa mendatang untuk meneliti tema terkait, namun dengan lingkup batasan yang lebih sempit maupun lokasi yang berbeda.

Batasan temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2007 hingga 2015. Penulis mengambil tahun 2007 karena menjadi awal ditindaklanjutinya program-program yang telah disepakati dalam MoU Sister City antara Kota Surabaya dengan Kota Busan di Surabaya. Selain itu, pada periode yang sama, pemerintah Korea Selatan juga sedang memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Periode 2007 hingga 2010 merupakan masa kepemimpinan Bambang Dwi Hartono yang menjadi awal digerakkannya program ini. Periode 2010 hingga 2015 merupakan masa kepemimpinan Tri Rismaharini yang ditandai dengan adanya peningkatan aspek kerja sama Sister City di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan pemerintah Kota Busan pada tahun 2015. Setelah tahun 2015 pemerintah kota Surabaya kembali pasif mengirimkan delegasi atau mengikuti suatu program yang ditawarkan oleh pemerintah kota Busan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pada beberapa dekade terakhir, kita dapat menyaksikan bahwa hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin baik.

Kunjungan kenegaraan antar kedua negara yang intensif juga menjadi salah satu faktor pendukung dari hubungan kerja sama antara keduanya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengacu pada kajian kepustakaan yang membahas tentang hubungan Indonesia-Korea , di antaranya:

Era Emas Hubungan Indonesia-Korea, Pertukaran Kultural Melalui Investasi dan Terjalin Hubungan Migrasi yang ditulis oleh Je Seong Jeon dan Yuwanto. Dari buku ini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin hubungan antar negara sejak 1973. Buku ini menjelaskan tentang hubungan kedua negara dengan fokus pada dampak dari hubungan timbal balik antar negara. Perbedaan konsep ekonomi yang diterapkan pada negara masing-masing memicu pertentangan, salah satunya di mana Korea memiliki konsep manajemen yang otoritatif sementara Indonesia memiliki konsep harapan paternalistik pada kepemilikan perusahaan atau tempat pekerjaan. Adapun arus investasi (kerja sama ekonomi) yang dipecah menjadi beberapa gelombang memicu perkembangan kerja sama. Buku ini juga menjelaskan mengenai permasalahan migrasi dan dampak budaya yang disebabkan dari adanya migrasi orang-orang Korea Selatan maupun Indonesia.

‘40 Years of Indonesia-Korea’s Relation’ yang disusun oleh INAKOS menceritakan hubungan Indonesia dan Korea Selatan, mulai dari aspek tinjauan historis, media massa, pendidikan dan penelitian, serta perspektif mahasiswa

terhadap kerja sama bilateral ini. Buku ini merupakan seri ketujuh yang dirilis oleh INAKOS¹⁶. Buku ini hanya membahas terkait kerja sama secara umum.

Negara dan Pembangunan: Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan karya Arief Budiman menceritakan perkembangan perekonomian kedua negara pasca kemerdekaan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak persamaan, seperti rezim militer pada akhir abad ke-20, perang saudara di Indonesia (PRRI dan Permesta) dan di Korea (Perang Korea), serta sama-sama menjadi daerah koloni Jepang. Adapun perbedaan dari kedua negara antara lain kondisi geografis dan etnis. Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan Korea Selatan negara dataran. Indonesia memiliki beragam etnisitas di dalamnya, berbeda dengan Korea yang masih satu rumpun bangsa. Buku ini menjelaskan kerja sama antara Indonesia-Korea Selatan dengan perspektif ekonomi. Mulai dari sistem ekonomi yang digunakan pasca kemerdekaan hingga akhir abad ke-20. Buku ini juga memaparkan perbandingan terhadap perkembangan perekonomian di kedua Negara.

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan karya Yang Seung-Yoon menceritakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dari zaman kerajaan hingga masa kini atau bisa disebut masuknya Indonesia pada Era Reformasi dan Korea Selatan memasuki Era Republik keenam atau demokrasi sipil. Dalam buku ini, penulis meletakkan perspektifnya pada perbedaan yang mendasar

¹⁶ INAKOS adalah singkatan dari *International Association of Korean Studies in Indonesia*. Ini merupakan NGO (*Non-Government Organization*) yang mewadahi bagi para akademisi maupun siswa yang ingin belajar tentang Korea Selatan dalam berbagai aspek.

yaitu faktor demografi kedua negara. Indonesia merupakan negara heterogen, sedangkan Korea Selatan merupakan negara yang homogen. Buku ini juga menjelaskan sebagian permasalahan terkait kerja sama era orde baru, di mana Korea Selatan masih menaruh perhatian khusus pada kawasan Mekong¹⁷.

Penulis menjadikan buku, artikel, serta jurnal yang telah diuraikan sebagai fondasi awal dalam penyusunan penelitian ini, karena lingkup batasan waktu penelitian yang kontemporer dan lingkungan tempatnya yang sempit.

1.6. Landasan Konseptual

Untuk menciptakan hasil penelitian yang dapat terfokus penuh, penulis menggunakan beberapa konsep penting sebagai kata kunci penelitian. Konsep ini dibutuhkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami pengertian dasar dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul ‘Hubungan Kota Surabaya dan Kota Busan ditinjau Dari Kerja sama Sister City pada 2007 – 2015’ tidak hanya memanfaatkan keilmuan sejarah, tetapi rumpun ilmu sosial lainnya. Ilmu bantu ini dapat dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini akan meneliti tentang peran daerah-daerah di Indonesia dalam kerja sama tingkat Internasional (Sister City) yang terfokus pada Korea Selatan. Pendekatan ilmu hubungan internasional digunakan untuk melihat tingkat atau level kedekatan antar negara atau bangsa yang menjalin kerja sama. Pendekatan ilmu ini juga tidak luput dari disiplin ilmu lain untuk melengkapi hasil analisisnya. Korea

¹⁷ Mekong merupakan sungai yang membentang dari Vietnam hingga Burma. Sungai ini terkenal sebagai jalur perdagangan di masa lampau.

Selatan membutuhkan lahan pasar yang luas sesuai dengan sistem ekonomi pasar yang dianut, sehingga mereka menjual teknologi canggih hasil karya bangsanya seperti LG, Samsung, dan Hyundai. Sementara itu, Indonesia membutuhkan fasilitas teknologi yang canggih dalam rangka menaikkan perekonomian di perkotaan. Adanya keterkaitan ini menimbulkan kehadiran hubungan intens demi menjalin prinsip 3P (*people, peace, and prosperity*) dan dampak positif bagi kedua negara.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani (2005), hubungan bilateral merupakan suatu kondisi hubungan timbal balik antar kedua belah pihak yang terlibat, di mana aktor utama dalam pelaksanaannya adalah negara atau '*sub-state*'.¹⁸ Seperti yang telah dijelaskan di atas, selama kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berimbang pada imbal balik yang positif, maka hubungan bilateral akan berlangsung cukup lama dan efektif.

Analisis terkait konsep rezim dalam pendekatan hubungan internasional juga berperan dalam penelitian ini. Pada konsep ini terdapat teori perdamaian demokratis yang memiliki makna bahwa negara-negara demokratis tidak akan saling berperang, melainkan akan menjalin hubungan antar negara demi terciptanya perdamaian dan penghargaan. Penggunaan pendekatan yang mengharuskan memahami kondisi dalam negeri menjadi kontribusi tersendiri dalam penelitian ini. Setiap rezim di berbagai negara atau '*sub-state*' juga memiliki periode tersendiri. Indonesia dan Korea Selatan memiliki sikap politik luar negeri yang berbeda, di

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *op. cit.*, hlm. 48.

mana Korea Selatan menganut asas pro-aktif sementara Indonesia menganut asas bebas dan aktif. Menurut analisis penulis, kedua sikap ini memiliki beberapa nilai yang relevan. Korea Selatan selalu menempatkan diri dalam isu-isu internasional agar menerima rekognisi global, tetapi bergantung pada aspek kerja sama prioritas, sedangkan Indonesia aktif menanggapi isu-isu internasional tanpa bergantung pada suatu negara. Nilai relevannya dapat dilihat bahwa Indonesia merespons negara yang memiliki tujuan yang sama dan timbal balik yang nyata, dan Korea Selatan menempatkan Indonesia sebagai salah satu prioritas kerja sama. Korea Selatan menjunjung tinggi nilai humanitarianisme sedangkan Indonesia menjunjung Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara.

Kerjasama antar daerah antar negara merupakan sebuah konsep hubungan kerja yang dilakukan oleh kedua daerah ataupun lebih dari negara yang berbeda, dalam kedudukan yang sejajar atau setingkat untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹ Menurut definisi tersebut kerjas sama antar daerah antar negara dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan antar dua atau lebih pemerintah daerah dari negara yang berbeda-beda dalam rangka merealisasikan tujuan bersama dengan cara menyediakan layanan ataupun berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan yang sama. Kemudian definisi dari sister city atau kota kembar atau twin town merupakan konsep pengikatan dua kota/daerah yang berbeda lokasi dan sosial politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak sosial antar penduduk kota. Pada umumnya, kerja sama sister city dilakukan

¹⁹ D.A. Patterson, *Intergovernmental Cooperation*, Albany, (New York State: Departement of State Divison of Local Government Services. 2008); H. Warsono, "Networking Dalam Intergovernmental Management", dalam *Dialogue*, JIAKP, Vol. 6, No.1, Jan 2009. hlm 82

atas dasar persamaan keadaan demografi, sejarah, ataupun masalah-masalah di dalam kota. Konsepsi sister city dapat dikatakan sebagai sehabat pena. Dalam kerja sama sister city aturan-aturan kerja sama yang akan dilakukan merujuk pada hak dan kewenangan setingkat kota. Maka dari itu perlu adanya kejelasan mengenai lingkup-lingkungan kerja sama yang akan dilakukan dan disepakati melalui negosiasi-negosiasi berkelanjutan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menuliskan penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu: Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode yang digunakan pertama adalah heuristik yaitu mencari data atau sumber yang diperlukan. Penulis melakukan pencarian data dan sumber yang berhubungan dengan tema penelitian yang berjudul ‘Hubungan Kota Surabaya dan Kota Busan ditinjau Dari Kerja sama Sister City pada 2007 – 2015’ di beberapa tempat ,yaitu koleksi khusus Departemen Sejarah UNAIR; Kantor Asosiasi Korea di Jawa Timur; Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta; Perpustakaan Korean Culture Center di Jakarta; Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya di Surabaya; Perpustakaan Medayu Agung di Surabaya; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya; dan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Bidang Administrasi Kerja Sama. Penulis juga memanfaatkan laman resmi seperti: <http://id.Korean-culture.org/id> (Korean Culture Center Indonesia), <http://www.inneKorean.or.id/> (Asosiasi Masyarakat Korea di Indonesia), <https://jdih.setneg.go.id/> (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI),

<https://jdih.kemlu.go.id/> (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri RI), dan <https://world.kbs.co.kr/> (KBS World Radio) . Sebagai salah satu contoh sumber primer yang penulis temukan, yakni MoU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya dan Pemerintah Kota Pusan, Korea Selatan, yang menjelaskan mengenai kerja sama Sister City. Adapun sumber primer lainnya, yakni Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Korean Association Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya yang berisi tentang pengaturan dana hibah yang diperuntukkan pembangunan taman persahabatan Indonesia-Korea dan juga Laporan Tahunan Kerja sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan.

Tahap selanjutnya adalah kritik, yaitu menguji atau memverifikasi sumber dan data yang telah didapat untuk mengetahui kebenarannya. Terdapat 2 cara yang digunakan dalam melakukan kritik sumber, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan kritik terhadap kredibilitas dari sumber, di mana isi data bisa dipertanggungjawabkan. Kritik eksternal merupakan kritik terhadap keaslian sumber yang dilihat dari siapa yang mengeluarkan dan hubungan apa yang dimiliki oleh pembuat data atau sumber.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis data-data yang telah diuji. Tahap ini dilakukan untuk memberikan inti persoalan dan merangkai aspek-aspek dari tahap sebelumnya. Interpretasi dilakukan dengan dua cara, yakni analisis yang menguraikan unsur dan sintetis yang menyatukan kembali unsur yang telah diuraikan.

Tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap di mana sumber-sumber yang telah dikritik internal dan eksternal serta diinterpretasikan sedemikian hingga menjadi narasi baru yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan mudah dipahami.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disajikan dalam 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab II Hubungan Indonesia dan Korea Selatan pada Abad Ke-20. Sub-bab pertama membahas mengenai hubungan Indonesia dan Korea Selatan dari awal hingga tahun 1990-an. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai pola-pola perkembangan politik luar negeri Indonesia di Era Orde Lama dan kaitannya dengan awal mula hubungan Indonesia dengan Korea Selatan hingga menjelaskan mengenai usaha Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada Era Orde Baru. Sub-bab kedua membahas mengenai Uniformitas Karakteristik Kota Surabaya dan Kota Busan. Di dalamnya dijelaskan mengenai sekilas tentang Kota Busan serta kemiripan kedua kota sebagai kota maritim dan kota metropolitan.

Bab III Kerja Sama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Metropolis Busan 2007 – 2015. Sub-bab pertama membahas tentang Memorandum of Understanding (MoU) Surabaya dengan Busan. Di dalamnya akan dijelaskan

mengenai isi-isi MoU yang tercantum dalamnya. Sub-bab kedua membahas mengenai bentuk kerja sama dalam bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Sub-bab ketiga akan membahas mengenai bentuk kerja sama dalam bidang perekonomian daerah.

Bab IV Pengaruh Atas Pelaksanaan Sister City Surabaya – Busan. Sub-bab pertama akan menjelaskan dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sub-bab kedua akan membahas dampak keberadaan Sister City bagi pemerintah Kota Surabaya. Sub-bab ketiga akan membahas mengenai tantangan dan kendala bagi pemerintah Kota Surabaya.

Bab V Kesimpulan, yang mencakup jawaban dari pembahasan masalah.